

Kajian Persebaran Permukiman Kumuh Di Surabaya Pusat

Aryani Kurniati

Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, aryanikurniati02@gmail.com

Drs. H. Suhadi H.S, M.Si

Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2012 yakni 2.784.887 jiwa dengan luas wilayah 331,87 km² dan kepadatan penduduk 8.391 jiwa/km² masalah ketersediaannya lahan untuk perumahan di Kota Surabaya khususnya wilayah Surabaya Pusat masih sangat kurang, sehingga masih banyak ditemukan warga yang memanfaatkan lahan ilegal sebagai tempat tinggal mereka. Berdasarkan data pra survei pendahuluan berapa warga di permukiman kumuh di Surabaya Pusat berpendapat bahwa datangnya para urban yang bermukim di daerah tersebut menyebabkan permukiman mereka menjadi kumuh, jalan menjadi sempit dan merusak keindahan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi penduduk permukiman kumuh di Surabaya Pusat dan untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh di Surabaya Pusat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, sebagai populasi seluruh kepala keluarga (KK) warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 348 kepala keluarga dengan disempurnakan menggunakan teknik proposional sampling. Teknik pengumpulan data yaitu melalui kuisioner dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan data persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat dianalisis menggunakan pendekatan keruangan dengan analisis pola keruangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial dan demografi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat didominasi dengan warga luar Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 284 orang atau sekitar 81,61%, dengan tingkat pendidikan warga yang didominasi oleh SMA (Sekolah Menengah Atas) yakni sebanyak 173 responden atau sekitar 49,71% dan jumlah keluarga terbanyak yaitu 4 orang sebanyak 277 responden atau 79,6%. Kondisi ekonomi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat didominasi oleh warga dengan jenis pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 244 responden atau 70,11% dan pendapatan warga yang didominasi oleh < Rp 1.740.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%, serta pengeluaran warga yang didominasi < Rp 1.740.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%. Persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat terdapat 44 RW di 13 Kelurahan dengan jumlah KK sebanyak 33.640 KK.

Kata kunci: persebaran, permukiman, kumuh ilegal

Abstract

Total population of Surabaya in 2012 is 2,784,887 inhabitants within an area of 331.87 km² thus resulting a population density of 8,391 people / km². Land availability for housing issues in the central Surabaya in particular is still lacking, so there are still many people who use the land illegally as their residence. Based on the pre preliminary survey of how many people lived in a slum area in central Surabaya, found that that the in migration of people living in the area caused settlement changed to slum settlements, the road becomes narrow and damaged the beauty of the city. This study aims to investigate the characteristics of the social, economic, and demographic slum dwellers in central Surabaya and to determine the pattern of distribution of slums settlements in central Surabaya

This type of research is survey research, the entire population of illegal families (KK) who lived slum settlements in central Surabaya. The samples in this study were 348 heads of families with refined using proportional sampling technique. Data collection techniques is through questionnaires and documentation. Data were analyzed using quantitative descriptive analysis and data distribution illegal slums in Surabaya Center analyzed using a spatial approach to the analysis of spatial patterns.

The results showed that social and demographic conditions of slum communities in Surabaya Central illegal residents outside Surabaya is dominated by the number of respondents were 284 people, or approximately 81.61%, with the level of education people are dominated by high school (high school) that as many as 173 respondents or approximately 49.71% and the highest number of families that as many as 4 277 respondents or 79.6%. Economic conditions in the illegal slums dominated by Central Surabaya residents with this type of work as traders or as many as 244 respondents 70.11% and income residents dominated by < Rp 1.740.000 the 330 respondents, or 94.83%, as well as spending by the dominated Rp 1,500,000 - Rp 2,000,000 which 302 respondents or 86.78%. Distribution of illegal slums in central Surabaya uniformly dispersed in 44 RW 13 Sub in the number of households as many as 33 640 households with a value of T = 19.2.

Keywords: distribution, settlements, illegal slum settlements

PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang lebih cepat menimbulkan berbagai masalah terhadap penyediaan prasarana, sarana dan lingkungan perumahan kota, karena tidak diimbangi dengan pengadaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya penduduk yang berpenghasilan rendah akan menempati lingkungan pemukiman yang sesuai dengan penghasilannya. Hal ini menjadikan timbulnya lingkungan permukiman kumuh. Dilihat dari kepadatan penduduk Surabaya pada sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2012 yakni 8391 jiwa/km². Surabaya merupakan wilayah penduduk sangat padat, dimana Komaruddin berpendapat bahwa yang yang disebut lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang berpenghuni padat melebihi 500 orang per Ha (Komaruddin, 1996:43).

Secara rinci data mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per wilayah kota Surabaya disajikan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Surabaya menurut Wilayah Bagian Kota Surabaya

Wilayah	Kecamatan	Total Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
Surabaya Pusat	Tegalsari	85606	4,29	19955
	Genteng	46548	4,05	11493
	Bubutan	84465	3,86	21882
	Simokerto	79319	2,59	30625
Σ		295938	14,79	20009
Surabaya Utara	Pabean	69423	6,8	10209
	Cantikan	151429	8,76	17286
	Kremlangan	106664	8,34	12789
	Kenjeran	163438	7,7	21226
	Bulak	37214	6,72	5538
Σ		528168	38,32	13783
Surabaya Timur	Tambaksari	204805	8,99	22781
	Gubeng	128127	7,99	16036
	Rungkut	121084	21,08	5744
	Trenggiling	72467	5,52	13128
	Mejoyo	62120	9,71	6398
	Gunung Anyar	119873	23,68	5062
	Sukolilo	94728	14,21	6666
	Mulyorejo	803204	91,18	8809
Surabaya Selatan	Sawahan	170605	6,93	24618
	Wonokromo	133211	8,47	15727
	Karang Pilang	72469	9,23	7851
	Dukuh Pakis	84249	9,94	8476
	Wiyung	67987	12,46	5456
	Wonocolo	80276	6,77	11858
	Gayungan	42717	6,07	7037
	Jambangan	46430	4,19	11081
Σ		697944	64,06	10895
Surabaya Barat	Tandes	103084	11,07	9312
	Sukomanunggal	100012	9,23	10836
	Asemworo	42704	15,44	2766
	Lakarsantri	54133	24,05	2251
	Benowo	47404	23,72	1998
	Pakal	51195	22,07	2320
	Sambikerep	61101	17,94	3406
Σ		459633	123,52	3721
Jumlah		2784887	331,87	8391

Sumber : BPS 2012

Dapat dilihat pada tabel 1 tersebut, diketahui bahwa wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terpadat adalah wilayah Surabaya Pusat dengan jumlah penduduk 20.009 jiwa/km², dapat dilihat pula kepadatan penduduk per kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Simokerto dengan 30.625 jiwa/km², dimana kecamatan ini terletak di wilayah Surabaya Pusat.

Berdasarkan data pra survei pendahuluan berapa warga di permukiman kumuh di Surabaya Pusat berpendapat bahwa datangnya para pendatang (urban) yang bermukim di daerah tersebut yang menyebabkan daerah tersebut menjadi kumuh, dikarenakan perilaku mereka yang menyimpang dan mengganggu pemukim lama di daerah tersebut. Mendirikan rumah di pinggir sungai dan jalan dengan seadanya tanpa memikirkan kondisi rumah yang layak huni sehingga jalan – jalan menjadi sempit serta mendirikan rumah- rumah di lahan – lahan sempit tanpa ijin dari pemerintah sehingga merusak keindahan kota daerah tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul “*Kajian Persebaran Permukiman Kumuh di Surabaya Pusat*”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian survei adalah penelitian yang menggunakan sampel sebagai populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan keruangan dengan analisis pola keruangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta –fakta dari gejala –gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan dan gambaran secara jelas tentang karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi penduduk permukiman kumuh di Surabaya Pusat.

Penelitian ini dilakukan di Surabaya Pusat, yakni Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Genteng, Kecamatan Simokerto, dan Kecamatan Bubutan. Hal ini didasari karena Surabaya Pusat merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terpadat di Surabaya pada sensus BPS tahun 2012 dengan kepadatan penduduk 8391 jiwa/km².

Populasi wilayah kumuh ilegal dari penelitian ini adalah semua Rukun Warga (RW) yang termasuk permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Sedangkan populasi untuk karakteristik kondisi sosial, ekonomi, dan demografi serta persepsi warga permukiman kumuh ilegal dari penelitian ini adalah semua penduduk Rukun Warga (RW) yang tinggal di wilayah permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat dengan menggunakan sampel dari populasi tertentu yang digunakan oleh Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%.

Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari opulasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

$\lambda^2=1$, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

P = Q = 0,5

D = 0,05

s = jumlah sampel

(Sugiyono, 2012:87)

Dari table penentuan sampel Isaac dan Michael dapat diketahui sampel dari populasi KK kumuh ilegal yang berjumlah 33.640 KK untuk tingkat kesalahan 5% jumlah sampel yang digunakan untuk meneliti karakteristik kondisi sosial, ekonomi dan demografi serta persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berjumlah 348 KK.

Jumlah sampel 348 KK di Surabaya Pusat yang ditentukan berdasarkan sampel dari populasi tertentu yang digunakan oleh Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan 5% dilakukan teknik pengambilan sampel dengan proporsional sampling, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau wilayah. Ada kalanya banyaknya subyek yang terdapat pada setiap strata atau wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing – masing strata atau wilayah (Arikunto, 2010:182).

Teknik pengambilan sampel dengan proporsional sampling yakni dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah KK kumuh di satu kelurahan}}{\text{jumlah KK kumuh keseturuhan}} \times \sum \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah responden untuk setiap kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah sampel warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berdasarkan perhitungan dengan proporsional sampling

No	Kelurahan	Rukun Warga Kumuh Ilegal			Proporsional Sampel
		Nama Rukun Warga	Jumlah RW	Jumlah KK	
1	Kapasari	1,2,3,4, 5,9,10	7	3145	33
2	Kapasan	1,4,10, 12,13	5	2329	24
3	Tambak Rejo	6,10,11 ,12	4	5006	52
4	Simokerto	2,13,14	3	1627	17
5	Simolawang	2,3,5	3	287	3
6	Jepara	2,9	2	189	2
7	Gundih	1,5	2	1196	12
8	Tembok Dukuh	2,3,4	3	2962	31
9	Bubutan	3, 10	2	897	9
10	Tegalsari	4,5,6,7	4	4327	45
11	Wonorejo	7,9,11	3	2900	30
12	Dr. Soetomo	2	1	900	9
13	Keputran	1,3,4,5, 8	5	7875	81
Jumlah		-	44	33640	348

Sumber : pra survei

Dengan jumlah sampel sebanyak 348 KK, maka untuk menentukan responden dari populasi KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat yang berjumlah 33.640 KK, maka peneliti menggunakan teknik penggunaan sampel secara random/acak yakni penentuan anggota sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Dalam teknik pengambilan sampel secara acak sederhana ini, peneliti melakukan dengan cara undian. Peneliti membuat daftar nama KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat sebanyak yakni berjumlah 33.640 KK dan kemudian memilihnya berdasarkan cara undian sebanyak 348 KK. Dari

hasil undian teknik pengambilan sampel dengan cara acak sederhana, maka ditentukannya 348 responden.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan data agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Dengan teknik ini peneliti mengambil data dari ::

- a. BAPPEKO
- b. BPS
- c. Kelurahan di Surabaya Pusat

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi Kepala Keluarga (KK) penduduk permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat maka data akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, yakni data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menghitung prosentase atas jawaban responden. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat maka setelah melakukan penelitian data akan dianalisis dengan pendekatan keruangan dengan analisis pola keruangan dan menggunakan rumus yang dikenal dengan Analisis Tetangga Terdekat/Nearest Analysis (Bintarto, 1979:74). Dalam menggunakan analisis tetangga terdekat harus diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menentukan batas wilayah yang akan diselidiki
2. Mengubah pola persebaran obyek menjadi pola persebaran titik (titik rumah warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat)
3. Memberikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah cara menganalisis
4. Mengukur jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan titik lainnya yang merupakan tetangga terdekatnya
5. Menghitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula sebagai berikut : $T = \frac{Jt}{Jh}$

Keterangan :

T : indeks penyebaran tetangga terdekat

Ju : jarak rata – rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga yang terdekat

Jh : jarak rata – rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random/acak = $\frac{1}{2\sqrt{P}}$

P :kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik (N) dibagi luas wilayah (A)

Analisis tetangga terdekat diatas dapat dilakukan dengan bantuan software Arc View GIS dengan Ekstensi Nearest Neighbour Analyst (ver.1.0). sehingga kategori indeks persebaran (T) yang digunakan yaitu, jika nilai T lebih kecil dari 1 (<1) menunjukkan pola megelompok, jika nilai T lebih besar dari 1 (>1) menunjukkan kecendrungan pola menyebar/acak.

(http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/net/shared/geoprocessing/spatial_statistics_tools/average_nearest_neighbor_spatial_statistics_.htm, diakses pada tanggal 20Juli2013).

HASIL PENELITIAN**Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat****Tempat asal**

Tempat asal ialah tempat tinggal warga sebelum menempati permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Berikut merupakan tabel distribusi karakteristik masyarakat sebelum menempati permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berdasarkan tempat asal.

Tabel 4 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No.	Tempat Asal	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
1	Surabaya	64	18,39
2	Luar Surabaya	284	81,61
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 348 KK yang beralamat asal Surabaya yaitu sebanyak 64 responden atau 18,39%. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan dari mereka adalah orang yang memang dari lahir tinggal hingga sekarang tinggal dipermukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Sedangkan yang beralamat asal di luar Surabaya yaitu sebanyak 284 responden atau 81,61%. Hal ini terjadi karena kebanyakan beralasan ingin mencari lapangan kerja di Kota Surabaya.

Tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dari masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat, berikut adalah data tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 5 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No	Pendidikan	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Lulus SD	33	9,48
2	SD/Sederajat	68	19,54
3	SMP/Sederajat	64	18,39
4	SMA/Sederajat	173	49,71
5	Diploma(D1-D3)	0	0
6	Sarjana(S1-S3)	10	2,87
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari table 5 di atas dapat diketahui bahwa dari 348 KK yang paling dominan yaitu SMA/ sederajat sebanyak 173 responden atau 49,71%. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti, karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan jenjang lebih tinggi sehingga memilih mencari lapangan kerja di kota.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempertahankan hidup. Berikut merupakan tabel distribusi karakteristik masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berdasarkan pekerjaan.

Tabel 6 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
1	TNI	0	0
2	POLRI	0	0
3	PNS/BUMN/BUMD	1	0,29
4	Pedagang	244	70,11
5	Pegawai Swasta	20	5,75
6	Dokter	0	0
7	Guru/Dosen	1	0,29
8	Wiraswasta	2	0,57
9	Buruh	25	7,18
10	Mahasiswa	0	0
11	Pelajar	0	0
12	Tani/Terak	0	0
13	Nelayan	0	0
14	Ibu Rumah Tangga	24	6,9
15	Tidak Bekerja	36	10,34
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 348 KK yang memiliki jenis pekerjaan paling dominan adalah sebagai pedagang sebanyak 244 responden atau 70,11%. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti, karena lokasi tempat bekerja (pasar) dekat dengan permukiman mereka sehingga mereka tetap tinggal di permukiman kumuh ilegal. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu 1 responden atau 0,29%.

Pendapatan

Pendapatan adalah banyaknya uang yang diperoleh keluarga dalam satu bulan. Berikut merupakan tabel distribusi karakteristik masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berdasarkan pendapatan.

Tabel 7 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No	Pendapatan	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
	< Rp		
1	1.740.000,00	330	94,83
2	Rp 1.740.000,00	-	-
3	> Rp 2.500.000	18	5,17
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa dari 348 KK, pendapatan yang paling dominan adalah < Rp 1.740.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%.

Pengeluaran

Pengeluaran adalah kumpulan dari berbagai kebutuhan yang dikeluarkan seseorang yang diukur selama satu bulan dalam satuan Rupiah.

Berikut merupakan tabel distribusi karakteristik masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat berdasarkan pengeluaran :

Tabel 8 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No	Pengeluaran	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
1	< Rp 500.000,00	0	0
2	Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00	9	2,59
3	Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00	18	5,17
4	Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00	302	86,78
5	> Rp 2.000.000,00	5	1,44
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa dari 348 KK, pengeluaran yang paling dominan adalah Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 yakni sebanyak 302 responden atau 86,78%.

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah semua anggota keluarga yang terdiri dari kepala keluarga sendiri, isteri/suaminya dan atau dengan anak (anak-anak) nya serta orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut seperti kakek, nenek dan sanak saudara yang tinggal dalam satu rumah. Berdasarkan data hasil penelitian dari masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat, diketahui jumlah anggota keluarga responden pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 9 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Keluarga Masyarakat Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No.	Jumlah Keluarga	Frekuensi (jiwa)	Persentase (%)
1	2	0	0
2	3	33	9,48
3	4	277	79,6
4	5	15	4,31
5	6	6	1,72
6	7	17	4,89
Jumlah		348	100

Sumber : Data primer di olah tahun 2013

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 348 KK yang memiliki jumlah keluarga paling sedikit yaitu 5 orang sebanyak 15 responden atau 4,31%. Sedangkan jumlah keluarga terbanyak yaitu 4 orang sebanyak 277 responden atau 79,6%.

Persepsi Masyarakat

a. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 992. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi

masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal adalah tempat tinggal warga yang tidak layak huni dan dibangun diatas tanah yang bukan miliknya atau tidak memiliki hak/sertifikat tanah = $(992 : 1.392) \times 100\% = 71,26\%$. Jadi, sebanyak 71,26% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal adalah tempat tinggal warga yang tidak layak huni dan dibangun diatas tanah yang bukan miliknya atau tidak memiliki hak/sertifikat tanah.

- b. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.178. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal dapat merusak keindahan kota = $(1.178 : 1.392) \times 100\% = 84,63\%$. Jadi, sebanyak 84,63% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal dapat merusak keindahan kota.
- c. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.118. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal terjadi karena sulitnya mendapatkan lahan yang luas dan murah di kota = $(1.118 : 1.392) \times 100\% = 80,32\%$. Jadi, sebanyak 80,32% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal terjadi karena sulitnya mendapatkan lahan yang luas dan murah di kota.
- d. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.115. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mempersempit jalan = $(1.115 : 1.392) \times 100\% = 80,1\%$. Jadi, sebanyak 80,1% menyatakan setuju bahwa menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mempersempit jalan.
- e. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.125. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mengganggu keamanan warga = $(1.125 : 1.392) \times 100\% = 81,82\%$. Jadi, sebanyak 81,82% menyatakan setuju bahwa menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mengganggu keamanan warga.

- f. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.052. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal memiliki kepadatan hunian rumah yang tinggi = $(1.052 : 1.392) \times 100\% = 75,57\%$. Jadi, sebanyak 75,57% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki kepadatan hunian rumah yang tinggi.
- g. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.257. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang kondisi bangunan rumah dipermukiman kumuh ilegal biasanya tidak terawat = $(1.257 : 1.392) \times 100\% = 90,3\%$. Jadi, sebanyak 90,3% menyatakan setuju bahwa kondisi bangunan rumah dipermukiman kumuh ilegal biasanya tidak terawat.
- h. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.094. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang rumah di permukiman kumuh ilegal biasanya tidak memiliki saluran permbuangan = $(1.094 : 1.392) \times 100\% = 78,59\%$. Jadi, sebanyak 78,59% menyatakan setuju bahwa rumah di permukiman kumuh ilegal biasanya tidak memiliki saluran permbuangan.
- i. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 939. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang rumah dipermukiman kumuh ilegal memiliki lantai kurang dari $8m^2$ = $(939 : 1.392) \times 100\% = 67,46\%$. Jadi, sebanyak 67,46% menyatakan setuju bahwa rumah dipermukiman kumuh ilegal memiliki lantai kurang dari $8m^2$.
- j. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = .048. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal biasanya terdapat di bantaran sungai, di bantaran rel kereta api, di bawah jembatan, dan di sekitar pasar tradisional = $(1.048 : 1.392) \times 100\% = 75,29\%$. Jadi, sebanyak 75,29% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal biasanya terdapat di bantaran sungai, di bantaran rel kereta api, di bawah jembatan, dan di sekitar pasar tradisional.
- k. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 903. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga di permukiman kumuh ilegal merasa nyaman tinggal di permukiman mereka = $(903 : 1.392) \times 100\% = 68,87\%$. Jadi, sebanyak 68,87% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal merasa nyaman tinggal di permukiman mereka.
- l. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 947. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga di permukiman kumuh ilegal merasa dekat dengan tempat mereka bekerja = $(947 : 1.392) \times 100\% = 68,03\%$. Jadi, sebanyak 68,03% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal merasa dekat dengan tempat mereka bekerja.
- m. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.153. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal memiliki kondisi drainase yang buruk = $(1.153 : 1.392) \times 100\% = 82,83\%$. Jadi, sebanyak 82,83% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki kondisi drainase yang buruk.
- n. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.259. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa sangat berbahaya menempati tempat tinggal mereka karena rawan bencana, misalnya banjir, tabrakan kereta api, atau kebakaran = $(1.259 : 1.392) \times 100\% = 90,44\%$. Jadi, sebanyak 90,44% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa sangat berbahaya menempati tempat tinggal mereka karena rawan

bencana, misalnya banjir, tabrakan kereta api, atau kebakaran.

- o. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.180. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang permukiman kumuh ilegal memiliki pengelolaan sampah yang buruk = $(1.180 : 1.392) \times 100\% = 84,77\%$. Jadi, sebanyak 84,77% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki pengelolaan sampah yang buruk.
- p. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 737. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga permukiman kumuh ilegal dengan mudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) = $(737 : 1.392) \times 100\% = 52,94\%$. Jadi, sebanyak 52,94% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga permukiman kumuh ilegal dengan mudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- q. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.188. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga permukiman kumuh ilegal tahu bahwa tempat tinggal mereka rawan penyakit misalnya demam berdarah, TBC, dll = $(1.188 : 1.392) \times 100\% = 85,34\%$. Jadi, sebanyak 85,34% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga permukiman kumuh ilegal tahu bahwa tempat tinggal mereka rawan penyakit misalnya demam berdarah, TBC, dll.
- r. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.189. Jadi, berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga dipermukiman kumuh ilegal sulit mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan = $(1.189 : 1.392) \times 100\% = 85,42\%$. Jadi, sebanyak 85,42% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal sulit mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan.

Kebijakan Pemerintah

- a. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.027. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang kebijakan untuk mengatasi permukiman kumuh ilegal salah satunya dengan pengurusan = $(1.027 : 1.392) \times 100\% = 73,78\%$. Jadi, sebanyak 73,78% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa kebijakan untuk mengatasi permukiman kumuh ilegal salah satunya dengan pengurusan.
- b. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item : $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 647. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang seharusnya pemerintah tidak perlu memperhatikan permukiman kumuh ilegal = $(647 : 1.392) \times 100\% = 46,48\%$. Jadi, sebanyak 46,48% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa seharusnya pemerintah tidak perlu memperhatikan permukiman kumuh ilegal.
- c. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 828. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga dipermukiman kumuh ilegal akan tetap tinggal disana walaupun sudah ada pemberitahuan bahwa permukiman mereka akan digusur = $(828 : 1.392) \times 100\% = 59,48\%$. Jadi, sebanyak 59,48% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan tetap tinggal disana walaupun sudah ada pemberitahuan bahwa permukiman mereka akan digusur.
- d. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.184. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga dipermukiman kumuh ilegal ingin dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) si dekat tempat tinggal mereka = $(1.184 : 1.392) \times 100\% = 85,06\%$. Jadi, sebanyak 85,06% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal ingin dibangunnya Rumah

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) si dekat tempat tinggal mereka.

- e. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.113. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) si dekat tempat tinggal mereka = $(1.113 : 1.392) \times 100\% = 79,96\%$. Jadi, sebanyak 79,96% menyatakan setuju bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) si dekat tempat tinggal mereka.
- f. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 348 KK warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat setelah dilakukan analisisnya menggunakan Skala Likert dengan skor yang telah ditetapkan, jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = $4 \times 348 = 1.392$, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini = 1.077. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap persepsi masyarakat permukiman kumuh ilegal tentang warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) si dekat tempat tinggal mereka = $(1.077 : 1.392) \times 100\% = 77,37\%$. Jadi, sebanyak 77,37% menyatakan setuju bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di dekat tempat tinggal mereka.

Pola Persebaran

Persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat dilihat dari pendekatan keruangannya dapat dilihat bahwa permukiman ilegal ini terjadi pada bantaran rel kereta api, bantaran sungai, dan sekitar pasar - pasar tradisional. Berikut ini adalah tabel persebaran permukiman kumuh di Surabaya Pusat :

Tabel 10 Persebaran Permukiman Kumuh Ilegal di Surabaya Pusat

No	Kelurahan	Rukun Warga Kumuh Ilegal		
		Nama RW	Jumlah RW	Jumlah KK
1	Kapasari	1,2,3,4,5,9,10	7	3145
2	Kapasan	1,4,10,12,13	5	2329
3	Tambak Rejo	6,10,11,12	4	5006
4	Simokerto	2,13,14	3	1627
5	Simolawang	2,3,5	3	287
6	Jepara	2,9	2	189
7	Gundih	1,5	2	1196
8	Tembok Dukuh	2,3,4	3	2962
9	Bubutan	3, 10	2	897
10	Tegalsari	4,5,6,7	4	4327
11	Wonorejo	7,9,11	3	2900
12	Dr. Soetomo	2	1	900
13	Keputran	1,3,4,5,8	5	7875
Jumlah		-	44	33640

Sumber : data primer

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa ada 13 kelurahan yang memiliki permukiman kumuh ilegal, yakni Kelurahan Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Simokerto, Kelurahan Simolawang, Kelurahan Jepara, Kelurahan Gundih, Kelurahan Tembok Dukuh, Kelurahan Bubutan, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Dr. Soetomo, dan Kelurahan Keputran. Permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat tersebar di 44 RW dengan jumlah KK seluruhnya yakni 33.640 KK, yakni terjadi pada RW1, RW2, RW3, RW4, RW5, RW9, dan RW10 Kelurahan Kapasari dengan jumlah KK 3.145 KK; RW1, RW4, RW10, RW12, dan RW13 Kelurahan Kapasan; RW6, RW10, RW11, dan RW12 Kelurahan Tambak Rejo; RW 2, RW13, dan RW 14 Kelurahan Simokerto; RW2, RW3, dan RW5 Kelurahan Simolawang; RW2 dan RW 9 Kelurahan Jepara; RW1 dan RW5 Kelurahan Gundih; RW2, RW3, dan RW4 Kelurahan Tembok Dukuh; RW3 dan RW10 Kelurahan Bubutan, RW4, RW5, RW6, dan RW7 Kelurahan Tegalsari; RW7, RW9, dan RW11 Kelurahan Wonorejo; RW2 Kelurahan Dr. Soetomo; serta pada RW1, RW3, RW4, RW5, dan RW 8 Kelurahan Keputran.

Pola persebaran permukiman kumuh di Surabaya Pusat adalah seragam, hal ini dapat dilihat dari analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan software Arc View GIS 3.3 dengan Ekstensi Nearest Neighbour Analyst (ver.1.0), sehingga dapat diketahui luas wilayah penelitian keseluruhan, jumlah titik permukiman kumuh 348, nilai T = 19,2185.

Untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Bubutan yakni dengan menghitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula maka :

Diketahui :

$$Ju = \frac{\text{jumlah jarak}}{\text{jumlah titik}} = \frac{0,776}{54} = 0,0144$$

$$P = \frac{\text{jumlah titik}}{\text{luas wilayah}} = \frac{54}{386} = 13,9896$$

$$Jh = \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{1}{2\sqrt{134715}} = \frac{1}{7,4805} = 0,1337$$

Ditanya : T ?

Jawab : $T = \frac{ju}{jh}$

$$T = \frac{0,0144}{0,1337} = 0,1075$$

Jadi, berdasarkan parameter tetangga terdekat, pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Bubutan adalah mengelompok dengan T = 0,1075

Untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Tegalsari yakni dengan menghitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula maka :

Diketahui :

$$Ju = \frac{\text{jumlah jarak}}{\text{jumlah titik}} = \frac{2,975}{165} = 0,018$$

$$P = \frac{\text{jumlah titik}}{\text{luas wilayah}} = \frac{165}{429} = 38,4615$$

$$Jh = \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{1}{2\sqrt{384615}} = \frac{1}{12,4035} = 0,0806$$

Ditanya : T ?

Jawab : $T = \frac{ju}{jh}$

$$T = \frac{0,0180}{0,0806} = 0,2236$$

Jadi, berdasarkan parameter tetangga terdekat, pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Tegalsari adalah mengelompok dengan $T = 0,0236$

Untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Genteng yakni dengan menghitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula maka :

Diketahui :

$$J_u = \frac{\text{jumlah Jarak}}{\text{jumlah Titik}} = \frac{0,659}{33} = 0,02$$

$$P = \frac{\text{jumlah Titik}}{\text{Luas Wilayah}} = \frac{33}{4,05} = 8,1481$$

$$J_h = \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{1}{2\sqrt{8,1481}} = \frac{1}{37090} = 0,1752$$

Ditanya : T ?

Jawab : $T = \frac{J_u}{J_h}$

$$T = \frac{0,02}{0,1752} = 0,1140$$

Jadi, berdasarkan parameter tetangga terdekat, pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Genteng adalah mengelompok dengan $T = 0,1140$

Untuk mengetahui pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Simokerto yakni dengan menghitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula maka :

Diketahui :

$$J_u = \frac{\text{jumlah Jarak}}{\text{jumlah Titik}} = \frac{3,926}{96} = 0,0409$$

$$P = \frac{\text{jumlah Titik}}{\text{Luas Wilayah}} = \frac{96}{2,59} = 37,0656$$

$$J_h = \frac{1}{2\sqrt{p}} = \frac{1}{2\sqrt{37,0656}} = \frac{1}{121763} = 0,0821$$

Ditanya : T ?

Jawab : $T = \frac{J_u}{J_h}$

$$T = \frac{0,0409}{0,0821} = 0,498$$

Jadi, berdasarkan parameter tetangga terdekat, pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Simokerto adalah mengelompok dengan $T = 0,498$.

PEMBAHASAN

Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat permukiman kumuh ilegal

Tempat asal ialah tempat tinggal warga sebelum menempati permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Tempat asal menjadi. Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa dari 348 KK, yang beralamat asal Surabaya yaitu sebanyak 64 responden atau 18,39%. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan dari mereka adalah orang yang memang dari lahir tinggal hingga sekarang tinggal dipermukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat. Sedangkan yang beralamat asal di luar Surabaya yaitu sebanyak 284 responden atau 81,61%. Hal ini terjadi karena kebanyakan beralasan ingin mencari lapangan kerja di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Sadyohutomo (2008:243), bahwa pemukiman kumuh adalah tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di pinggiran kota yang penghuninya umumnya berasal dari para migran luar daerah.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh responden. Dapat diketahui dari hasil

penelitian ini bahwa dari 348 KK yang yang paling dominan yaitu SMA/ sederajat sebanyak 173 responden atau 49,71%. Berdasarkan hasil data survei penelitian hal ini terjadi karena warga tidak memiliki biaya untuk meneruskan jenjang lebih tinggi sehingga memilih untuk bekerja, sehingga terdapat 70,11% warga yang bekerja disektor informal yakni sebagai pedagang. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Barthos (1990:25), bahwa pada umumnya seseorang yang berpendidikan cenderung memilih pekerjaan disektor informal.

Jenis pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempertahankan hidup. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa dari 348 KK yang memiliki jenis pekerjaan paling dominan adalah sebagai pedagang sebanyak 244 responden atau 70,11%. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti, karena lokasi tempat bekerja (pasar) dekat dengan permukiman mereka sehingga mereka tetap tinggal di permukiman kumuh ilegal. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu 1 responden atau 0,29%.

Karena semakin besar jumlah anggota keluarga, maka akan semakin besar pula jumlah anggota yang turut bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan sebaliknya jika anggota keluarga tidak bekerja maka akan menjadi beban tanggungan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 348 KK, pendapatan yang paling dominan adalah < Rp 1.740.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%. Hal ini dikarenakan dilihat dari hasil penelitian ini terdapat 70,11% warga yang bekerja disektor informal yakni sebagai pedagang dengan tingkat pendidikan rata – rata warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat sebanyak 49,71% adalah tamatan SMA. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Azrul Azwar (1990:81), rumah berfungsi sebagai lambang status sosial bagi kesejahteraan pemiliknya. Pembangunan rumah/tempat tinggal membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari perencanaan pembuatan pondasi rumah, pembelian material pembangunan, hingga pembelian perabotan rumah. Oleh karena itu, jika pendapatan tinggi maka tidak akan mengalami kesulitan dalam membangun tempat tinggal, rumah layak huni, dan memenuhi kriteria rumah sehat.

Pengeluaran adalah kumpulan dari berbagai kebutuhan yang dikeluarkan seseorang yang diukur selama satu bulan dalam satuan Rupiah. Dari penelitian ini apat diketahui bahwa dari 348 KK, pengeluaran yang paling dominan adalah Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 yakni sebanyak 302 responden atau 86,78%.

Jumlah keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah semua anggota keluarga yang terdiri dari kepala keluarga sendiri, isteri/suaminya dan atau dengan anak (anak-anak) nya serta orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut seperti kakek, nenek dan sanak saudara yang tinggal dalam satu rumah. Jumlah anggota keluarga penting untuk dianalisis karena untuk mengetahui berapa besar kepadatan hunian rumah. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 348 KK yang memiliki jumlah keluarga paling sedikit yaitu 5 orang sebanyak 15 responden atau 4,31%. Sedangkan jumlah keluarga terbanyak yaitu 4 orang sebanyak 277 responden atau 79,6%.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa warga permukiman kumuh ilegal dominan mengatakan setuju bahwa keberadaan mereka memberikan banyak dampak negatif bagi diri mereka sendiri sebagai warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat maupun warga sekitar permukiman yang berada di dekat permukiman mereka. Dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 71,26% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal adalah tempat tinggal warga yang tidak layak huni dan dibangun diatas tanah yang bukan miliknya atau tidak memiliki hak/sertifikat tanah, sebanyak 84,63% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal dapat merusak keindahan kota, sebanyak 80,32% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal terjadi karena sulitnya mendapatkan lahan yang luas dan murah di kota, sebanyak 80,1% menyatakan setuju bahwa menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mempersempit jalan, sebanyak 81,82% menyatakan setuju bahwa menurut banyak warga sekitar permukiman kumuh ilegal dapat mengganggu keamanan warga, sebanyak 75,57% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki kepadatan hunian rumah yang tinggi, sebanyak 90,3% menyatakan setuju bahwa kondisi bangunan rumah dipermukiman kumuh ilegal biasanya tidak terawat. Sebanyak 78,59% menyatakan setuju bahwa rumah di permukiman kumuh ilegal biasanya tidak memiliki saluran pembuangan. Sebanyak 67,46% menyatakan setuju bahwa rumah dipermukiman kumuh ilegal memiliki lantai kurang dari $8m^2$, sebanyak 75,29% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal biasanya terdapat di bantaran sungai, di bantaran rel kereta api, di bawah jembatan, dan di sekitar pasar tradisional, sebanyak 82,83% menyatakan setuju bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki kondisi drainase yang buruk, sebanyak 90,44% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa sangat berbahaya menempati tempat tinggal mereka karena rawan bencana, misalnya banjir, tabrakan kereta api, atau kebakaran, sebanyak 84,77% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa permukiman kumuh ilegal memiliki pengelolaan sampah yang buruk, sebanyak 85,34% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga permukiman kumuh ilegal tahu bahwa tempat tinggal mereka rawan penyakit misalnya demam berdarah, TBC, dll. Namun sangat diherankan mengapa keberadaan mereka dapat diterima oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa sebanyak 52,94% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga permukiman kumuh ilegal dengan mudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebanyak 85,42% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal sulit mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan.

Dari keterangan beberapa warga, permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat sudah diberikan peringatan berupa surat penggusuran rumah yang disebarluaskan melalui RT setempat kepada setiap KK secara langsung. Namun, warga masih saja menempati atau bertahan untuk tinggal di permukiman kumuh ilegal tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian ini sebanyak 73,78% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa kebijakan

untuk mengatasi permukiman kumuh ilegal salah satunya dengan penggusuran, sebanyak 46,48% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa seharusnya pemerintah tidak perlu memperhatikan permukiman kumuh ilegal, sebanyak 59,48% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan tetap tinggal disana walaupun sudah ada pemberitahuan bahwa permukiman mereka akan digusur. Hal ini karena dari beberapa warga mengatakan bahwa mereka sudah sejak lama tinggal di permukiman tersebut, merasa nyaman dan memang dekat dari tempat mereka bekerja, dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian ini bahwa warga dominan memilikipekerjaan sebagai pedagang, dapat dilihat pula dari hasil penelitian ini bahwa sebanyak 68,87% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal merasa nyaman tinggal di permukiman mereka. Sebanyak 68,03% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal merasa dekat dengan tempat mereka bekerja. Pembangunan rumah susun merupakan suatu model penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian yang layak. Rumah susun merupakan sebagai suatu bangunan rumah bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal terdiri atas satuan atau unit dengan batasan yang jelas baik ukuran maupun luasnya. Rumah susun juga model penanganan permukiman kumuh ilegal yang diinginkan warga permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat, dapat dilihat dari hasil penelitian sebanyak 85,06% menyatakan setuju bahwa warga di permukiman kumuh ilegal tahu bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal ingin dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di dekat tempat tinggal mereka, sebanyak 79,96% menyatakan setuju bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di dekat tempat tinggal mereka, sebanyak 77,37% menyatakan setuju bahwa warga dipermukiman kumuh ilegal akan pindah/meninggalkan tempat tinggal mereka jika pemerintah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di dekat tempat tinggal mereka.

Pola Persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat

Berdasarkan kompleksitas gejalanya, permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat, dapat ditinjau dari proses terbentuknya yakni merupakan gejala buatan manusia. Permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat terjadi karena masyarakat membangun rumah yang tidak layak huni dilahan yang bukan miliknya atau tidak mempunyai hak kepemilikan tanah, dan jika ditinjau dari ekspresi keruangannya permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat merupakan gejala fisik budawi/artifisial yang diartikan sebagai gejala yang ekspresi keruangannya bersifat fisik namun proses pembentukannya disebabkan oleh kegiatan manusia. Dalam analisis keruangan untuk mengabstraksikan obyek permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat, yakni dipilihnya simbol titik sebagai satuan individual yang berupa rumah.

Permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat pada tahun 2013 terjadi karena sulitnya mendapatkan lahan yang kosong dan murah di perkotaan. Hal ini terjadi ketika banyak warga yang menempati lahan – lahan yang bukan miliknya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, biasanya terjadi di bantaran rel kereta api, bantaran sungai, dan sekitar pasar tradisional. Yang berperan dalam proses terjadinya permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat adalah didominasi oleh warga luar Kota Surabaya yakni Madura, dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas), dengan jumlah anggota keluarga yang didominasi sebanyak 4 orang dan dengan jenis pekerjaan yang didominasi sebagai pedagang. Sedangkan yang mengalami dampak negatif dari sebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat adalah warga Kota Surabaya khususnya warga sekitar permukiman kumuh ilegal yang memiliki hak kepemilikan tanah.

Berdasarkan analisis tetangga terdekat dari pendekatan keruangan dapat diketahui bahwa pola permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat tersebar secara seragam di 13 kelurahan ilegal, yakni Kelurahan Kapasari, Kelurahan Kapasan, Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Simokerto, Kelurahan Simolawang, Kelurahan Jepara, Kelurahan Gundih, Kelurahan Tembok Dukuh, Kelurahan Bubutan, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Dr. Soetomo, dan Kelurahan Keputran. Permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat tersebar di 44 RW dengan jumlah KK seluruhnya yakni 33.640 KK.

Berdasarkan parameter tetangga terdekat per kecamatan, pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Kecamatan Bubutan adalah mengelompok dengan $T = 0,1075$, di Kecamatan Tegalsari adalah mengelompok dengan $T = 0,0236$, di Kecamatan Genteng adalah mengelompok dengan $T = 0,1140$, dan di Kecamatan Simokerto adalah mengelompok dengan $T = 0,498$. Hal ini terjadi karena adanya banyak lahan – lahan yang di bantaran rel kereta api yang memang menurut survei penelitian beberapa warga mengatakan lahanya disewakan oleh PT.KAI, contohnya di permukiman kumuh ilegal yang terjadi di Kelurahan Kapasari, Kelurahan Tambak Rejo, Kelurahan Simokerto, dan Kelurahan Simolawang. Pada permukiman kumuh ilegal yang terjadi di bantaran sungai terjadi di bantaran Sungai Kali Mas dan Sungai Greges, yakni permukiman kumuh ilegal yang terjadi pada RW3, RW5, dan RW8 Kelurahan Keputran dan RW2 Kelurahan Dr. Soetomo. Sedangkan permukiman kumuh yang terjadi disekitar pasar terjadi karena adanya Pasar Keputran, Pasar Tegalsari, Pasar Kembang, Pasar Kapasan, Dupak Grosir Surabaya, Pusat Grosir Surabaya, seperti permukiman kumuh yang terjadi pada RW 1 Keputran; RW4, RW5, RW6, dan RW7 Kelurahan Tegalsari; RW7, RW9, dan RW11 Kelurahan Tegalsari; RW1, RW4, RW10, RW12, dan RW13 Kelurahan Kapasan; RW 2 Kelurahan Jepara; serta pada RW1 dan RW5 Kelurahan Gundih.

PENUTUP

Simpulan

Kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat Masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat didominasi dengan warga luar surabaya dengan jumlah responden

sebanyak 284 orang atau sekitar 81,61%, dengan tingkat pendidikan warga yang didominasi oleh SMA (Sekolah Menengah Atas) yakni sebanyak 173 responden atau sekitar 49,71% dan jumlah keluarga paling sedikit yaitu 5 orang sebanyak 15 responden atau 4,31%. Sedangkan jumlah keluarga terbanyak yaitu 4 orang sebanyak 277 responden atau 79,6%. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat didominasi oleh warga dengan jenis pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 244 responden atau 70,11% dan pendapatan warga yang didominasi oleh < Rp 1.7.40.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%, serta pengeluaran warga yang didominasi < Rp 1.7.40.000 yakni sebanyak 330 responden atau 94,83%. Pola persebaran permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat adalah seragam dengan nilai $T = 19,22$.

Saran

Bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah agar lebih memperhatikan masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat tentunya dengan menindak tegas penyalahgunaan lahan – lahan milik pemerintah yang digunakan untuk perumahan ilegal, serta lebih meningkatkan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat.

Bagi masyarakat permukiman kumuh ilegal di Surabaya Pusat agar lebih memperhatikan hukum tentang kepemilikan lahan/tanah, merawat rumah dan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2009-2011*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Surabaya Dalam Angka 2012*. Surabaya: Badan Pusat Statistik
- Bintarto, R dan Surastopo Hadikusumo.1979. *Metode Analisa Geografi* Jakarta : LP3ES
- Komaruddin. 1996. *Menelusuri Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Rajawali Press
- Prasetyo, Bambang & Lina, Miftahul.J. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sabari, Hadi. 2010. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta